

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam melaksanakan pembangunan nasional maka bangsa Indonesia membutuhkan dana yang digunakan sebagai biaya pembangunan yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut dapat berasal dari dua sumber pendanaan, yaitu sumber pendanaan yang berasal dari pajak dan non pajak. Namun, pada kenyataannya pajak merupakan sumber penerimaan utama dan paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin.

Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan Pemerintah. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh undang-undang (*tax avoidance*) dan wajib pajak cenderung untuk menyeludupkan pajak (*tax evasion*) sepanjang wajib pajak tersebut yakin bahwa orang lainpun melakukan hal yang sama.

Penghindaran pajak yang legal dan maksimal dapat diupayakan melalui kegiatan *tax planning*. *Tax planning* adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia (Pohan;2012). Keberhasilan pelaksanaan *tax planning* dalam rangka menghasilkan *tax avoidance* yang maksimal sangat ditentukan keadaan internal perusahaan, seperti: ketersediaan

data, informasi, sistem yang berlaku dan sumber daya yang mendukung perusahaan sendiri. Sementara dinamisasi peraturan perpajakan yang berlaku, situasi pasar, politik dan faktor eksternal lainnya merupakan hal yang tidak dapat dikontrol oleh manajemen perusahaan.

Pada kenyataannya melakukan praktek *tax avoidance* di Indonesia masih diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan atau hukum yang berlaku. Walaupun *tax avoidance* dianggap legal tidak melanggar hukum, tetapi apabila maksud tujuannya untuk mengurangi pajak yang seharusnya dibayar melebihi batas yang diperbolehkan oleh hukum maka praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini dapat dikategorikan sebagai manipulasi pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan negara karena secara langsung praktik tersebut telah mengurangi pemasukan negara.

Dalam kasus ini peran aparat pajak (fiskus) diperlukan untuk mengetahui apakah dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak terdapat indikasi-indikasi melakukan *tax avoidance* yang berlebihan sehingga mengarah kepada manipulasi pajak. Mengingat *tax avoidance* masih dalam koridor hukum dan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan sehingga lebih sulit untuk menentukan apakah *tax avoidance* yang dilakukan masih dalam koridor yang diperbolehkan atau tidak. Aparatur pajak merupakan pihak yang memiliki posisi sangat penting dalam proses penerimaan pembayaran pajak karena dalam proses pembayaran tersebut aparat pajak merupakan pihak yang paling memiliki kemampuan lebih untuk mengidentifikasi apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Melihat pentingnya peran aparatur pajak dalam penerimaan pajak negara, maka aparatur pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan dibidang perpajakan khususnya tentang *tax avoidance*. Pengetahuan tersebut salah satunya dilihat dari pendidikan yang ditempuh oleh fiskus. Selain itu pengalaman kerja aparatur pajak juga mempengaruhi penambahan pengetahuan aparatur pajak dengan melihat jangka waktu bekerja. Semakin lama pengalaman kerja yang dimiliki aparatur pajak maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang didapatkan dari lingkungan kerja mereka. Aspek lain yang dapat mendukung atau menunjang pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance* adalah Pelatihan. Pelatihan dalam pembahasan penelitian ini dikhususkan pada *tax training* (pelatihan pajak) yang diikuti oleh aparatur pajak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pemahaman *tax avoidance* dengan judul “**PENGARUH FAKTOR PENDIDIKAN, PENGALAMAN KERJA DAN PELATIHAN TERHADAP PENGETAHUAN APARATUR PAJAK TENTANG *TAX AVOIDANCE* (STUDI KASUS PADA APARATUR PAJAK DI KPP PEKANBARU TAMPAN)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh pendidikan terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*?
2. Bagaimanakah pengaruh pengalaman kerja terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*?
3. Bagaimanakah pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*?
4. Bagaimanakah pengaruh pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan secara simultan terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendidikan terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*
4. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan secara simultan terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuka kemungkinan untuk penelitian tindakan lebih lanjut dan mendalam tentang permasalahan sejenis.

2 Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan dalam masalah perpajakan serta sebagai saran dalam mengambil keputusan.

3 Manfaat bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan acuan bagi penelitian yang sejenis selanjutnya.

1.5 Pembatasan Masalah dan Originalitas

1.5.1 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini pada masalah bagaimana pengaruh faktor pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance* (studi kasus pada aparatur pajak di KPP Pekanbaru Tampan).

1.5.2 Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Noorina Ayuningtyas (2013), melakukan penelitian dengan judul ” Pengaruh Faktor Pendidikan, Pengalaman Kerja dan pelatihan Terhadap pengetahuan Aparatur Pajak tentang *Tax Avoidance* (Studi Kasus Atas Aparatur Pajak pada KPP Pratama Batu. Hasil menunjukkan secara simultan ketiga variabel menunjukkan signifikan sebesar 0,000. Secara parsial pendidikan menunjukkan signifikan sebesar 0,000; pengalaman kerja sebesar 0,049; dan pelatihan sebesar 0,049.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah faktor pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari tiga bab yakni:

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.
- BAB II : Merupakan kajian pustaka, kerangka konseptual dan hipotesis. Pada kajian pustaka di bahas teori-teori atau konsep yang mendukung topik penelitian mengenai faktor pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan dan pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*.
- BAB III : Merupakan metode penelitian yang menjelaskan tentang waktu dan tempat penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, defenisi operasional variabel serta analisis data.
- BAB IV : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data penelitian dan pembahasan.
- BAB V : Merupakan penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pendidikan

Anoraga (2009:52-53) pendidikan merupakan usaha sadar dan sistematis yang berlangsung seumur hidup dalam rangka menglihkan pengetahuan oleh seseorang kepadaorang lain. Flippo (2012:69) pendidikan adalah berhubungan

dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh.

Pendidikan dapat bersifat formal maupun non formal. Menurut Nasution (2009:10-11) dalam, tingkat pendidikan terdiri dari pendidikan formal yang dilakukan seseorang secara berjenjang dan berkesinambungan dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan formal ditempuh mulai dari sekolah taman kanak-kanak hingga pendidikan di lembaga pendidikan tinggi dimana pendidikan dilakukan di ruang kelas dan dengan program yang terstruktur. Sedangkan pendidikan non formal dapat terjadi dimana saja. Dalam kedua situasi pendidikan ini, pengalihan pengetahuan dan keterampilan terjadi (Sri Hastuti, 2012:32).

2.1.1. Manfaat dan Tujuan Pendidikan

Menurut David Popenoe (2009:56), ada empat macam manfaat pendidikan yakni sebagai berikut:

1. Transmisi (pemindahan) kebudayaan.
2. Memilih dan mengajarkan peranan sosial.
3. Menjamin integrasi sosial.
4. Sekolah mengajarkan corak kepribadian.
5. Sumber inovasi sosial.

2

Herbert Spencer (2010:23) merupakan salah satu filsuf pendidikan. Beliau mengatakan bahwa pendidikan memiliki 5 tujuan yang juga merupakan bagian dari pendidikan itu sendiri yaitu:

1. Kegiatan demi kelangsungan hidup (*Activities for survival*).
2. Usaha mencari nafkah (*Efforts to make a living*).
3. Pendidikan anak (*Child education*).

4. Pemeliharaan hubungan dengan masyarakat dan negara (*Maintenance of relationships with communities and countries*).
5. Penggunaan waktu senggang (*Use of leisure time*).

2.1.2. Indikator Pendidikan

Hasbullah (2011:63) menyebutkan indikator untuk pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Ideologi
Semua manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang sama khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan pendidikan.
- b. Sosial Ekonomi
Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi memungkinkan seseorang mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- c. Sosial Budaya
Masih banyak orang tua yang kurang menyadari akan pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya.

Umar (2010:29) menyebutkan indikator pendidikan yaitu :

1. reaksi
Tingkat reaksi adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan suatu pendidikan. Bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pendidikan tersebut.
2. Pembelajaran
Tingkat pembelajaran adalah untuk mengukur tingkat tambahan pengetahuan, keterampilan maupun perubahan sikap peserta setelah mengikuti pendidikan.
3. perilaku
Tingkat perilaku untuk mengetahui tingkat perubahan perilaku kerja peserta pendidikan setelah kembali ke lingkungan kerjanya. Perilaku

yang dimaksud disini adalah perilaku kerja yang ada hubungannya langsung dengan materi pendidikan , dan bukan perilaku dalam konteks hubungan personal dengan rekan-rekan kerjanya. Jadi yang ingin diketahui ialah seberapa jauh perubahan sikap mental (*attitude*), perbaikan pengetahuan, atau penambahan keterampilan peserta membawa pengaruh langsung terhadap kinerja peserta ketika kembali ke lingkungan kerjanya. Apakah perubahan sikap mental (*attitude*), perbaikan pengetahuan atau penambahan keterampilan peserta ini diimplementasikan dalam lingkungan kerja peserta ataukah dibiarkan berkarat dalam diri peserta tanpa pernah diimplementasikan.

4. Hasil

Tingkat akhir adalah untuk mengetahui dampak perubahan perilaku kerja peserta pendidikan terhadap tingkat produktivitas perusahaan. Bertujuan untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau perusahaan secara keseluruhan.

2.2 Pengalaman Kerja

Menurut KBBI (2009:26) pengalaman dapat diartikan sebagai yang pernah dialami (dijalani, dirasa, ditanggung, dan sebagainya). Menurut Dewey (2009:23) pengalaman tidak menunjuk saja pada sesuatu yang sedang berlangsung di dalam kehidupan batin, atau sesuatu yang berada di balik dunia inderawi yang hanya dapat dicapai dengan akal budi atau intuisi. Pandangan Dewey mengenai pengalaman bersifat menyeluruh dan mencakup segala hal. Pengalaman menyangkut alam semesta batu, tumbuh-tumbuhan, binatang, penyakit, kesehatan, temperatur, listrik, kebaktian, respek, cinta, keindahan, misteri, singkatnya seluruh kekayaan pengalaman itu sendiri.

Pengalaman kerja menunjukkan berapa lama agar supaya karyawan bekerja dengan baik. Disamping itu pengalaman kerja meliputi banyaknya jenis pekerjaan atau jabatan yang pernah diduduki oleh seseorang dan lamanya mereka bekerja pada masing-masing pekerjaan atau jabatan tersebut. Dengan demikian masa kerja merupakan faktor individu yang berhubungan dengan perilaku dan persepsi individu yang mempengaruhi pengembangan karir karyawan (Hasibuan, 2010:56).

2.2.1 Manfaat Pengalaman Kerja

Hasibuan (2010:23) menyebutkan manfaat yang diperoleh dari pengalaman kerja yaitu :

1. Mendapat rekan kerja sebanyak mungkin dan menambah pengalaman kerja dalam berbagai bidang.
2. Mencegah dan mengurangi persaingan kerja yang sering muncul di kalangan tenaga kerja.

2.2.2 Indikator Pengalaman Kerja

Asri (2009:131) beberapa hal yang digunakan untuk mengukur pengalaman kerja seseorang adalah:

1. Gerakannya mantap dan lancar
Setiap karyawan yang berpengalaman akan melakukan gerakan yang mantap dalam bekerja tanpa disertai keraguan.
2. Gerakannya berirama
Artinya terciptanya dari kebiasaan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.
3. Lebih cepat menanggapi tanda–tanda
Artinya tanda–tanda seperti akan terjadi kecelakaan kerja.

4. Dapat menduga akan timbulnya kesulitan sehingga lebih siap menghadapinya karena didukung oleh pengalaman kerja dimilikinya maka seorang pegawai yang berpengalaman dapat menduga akan adanya kesulitan dan siap menghadapinya.

5. Bekerja dengan tenang

Seorang pegawai yang berpengalaman akan memiliki rasa percaya diri yang cukup besar.

Menurut Foster (2009:43), ada beberapa indikator untuk menentukan pengalaman kerja seorang pegawai yaitu :

1. Lama waktu atau masa kerja
Adalah ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakan dengan baik.
2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki
Yaitu pengetahuan merujuk pada konsep, prinsip, prosedur, kebijakan atau informasi lain yang dibutuhkan pegawai. Pengetahuan juga mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggungjawab pekerjaan. Sedangkan keterampilan merujuk pada kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk mencapai atau menjalankan suatu tugas atau pekerjaan.
3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan
Yaitu tingkat penguasaan seseorang dalam pelaksanaan aspek-aspek teknik peralatan dan aspek-aspek teknik pekerjaan.

2.3 Pelatihan

Pelatihan menurut Dessler (2009:87) adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam

dunia kerja. Pegawai, baik yang baru ataupun yang sudah bekerja perlu mengikuti pelatihan. Karena adanya tuntutan pekerjaan yang dapat berubah akibat perubahan lingkungan kerja, strategi, dan lain sebagainya.

Sumarsono (2009:32) pelatihan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan SDM. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan, akan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja, dengan demikian dapat meningkatkan produktivitas kerja.

2.3.1 Tujuan Pelatihan

Menurut Sumarsono (2009:33), Penyelenggaraan diklat secara umum bertujuan untuk :

1. Meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian dan ketrampilan.
2. Menciptakan adanya pola berpikir sama.
3. Menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang baik.
4. Membina karier PNS.

Menurut Sumarsono (2009:33), tujuan dari pendidikan dan pelatihan antara lain :

1. Pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik.
2. Tanggung jawab diharapkan lebih besar.
3. Kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan berkurang.
4. Kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin.

2.3.2 Indikator Pelatihan

Hasibuan (2010:12), indikator pelatihan antara lain:

1. Instruktur
Mengingat pelatih umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka para pelatih yang dipilih untuk memberikan materi pelatihan harus benar-benar memiliki kualifikasi yang memadai sesuai bidangnya, personal dan kompeten, selain itu pendidikan instrukturpun harus benar-benar baik untuk mengikuti pelatihan.
2. Peserta
Peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan persyaratan tertentu dan kualifikasi yang sesuai, selain itu peserta pelatihan juga harus memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan.
3. Materi Pelatihan
Sumber daya manusia merupakan materi atau kurikulum yang sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai oleh perusahaan dan materi pelatihan pun harus update agar si peserta dapat memahami masalah yang terjadi pada kondisi yang sekarang. Metode Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis materi dan komponen peserta pelatihan.
4. Tujuan Pelatihan
Merupakan tujuan yang ditentukan, khususnya terkait dengan penyusunan rencana aksi dan penetapan sasaran, serta hasil yang diharapkan dari pelatihan yang akan diselenggarakan, selain itu tujuan pelatihan pula harus disosialisasikan sebelumnya pada para peserta agar peserta dapat memahami pelatihan tersebut.
5. Sasaran
Sasaran pelatihan harus ditentukan dengan kriteria yang terinci dan terukur.

2.4 Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah hasil tahu dari manusia terdiri dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya (Notoatmodjo, 2009:143).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007) pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (*over behaviour*). Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu.

2.4.1 Indikator Pengetahuan

Notoatmodjo (2009:43), berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu :

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.

Pendidikan

b. Mass media / informasi

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek (*immediate impact*) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan.

c. Sosial budaya dan ekonomi

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya walaupun tidak melakukan. Status ekonomi

seseorang juga akan menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan mempengaruhi pengetahuan seseorang.

d. Lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan tersebut.

e. Pengalaman

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman baik dari pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain.

f. Usia

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik.

2.5 Aparatur Pajak

Fiskus atau Aparatur Pajak atau Pejabat Pajak adalah orang atau badang yang bertugas untuk melakukan pemungutan pajak atau iuran kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut oleh fiskus ini nantinya akan digunakan untuk pengeluaran rutin dan pembangunan nasional, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan. Secara bahasa, fiskus berasal dari bahasa Latin, yang artinya “keranjang berisi uang atau kantong uang”.

Menurut PERATURAN PAJAK MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/PM.3 tahun 2007, yang dimaksud dengan fiskus adalah calon pegawai negeri

sipil dan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 43 tahun 1999 yang bekerja pada Direktorat Jenderal Pajak.

2.5.1 Tugas dan Wewenag Aparatur Pajak

Menurut PERATURAN PAJAK MENTERI KEUANGAN NOMOR

1/PM.3 tahun 2007 adapun tugas dan wewenang aparaturnya adalah:

1. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Fiskus pajak memiliki wewenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak terkait dengan penyetoran atau penagihan pajak, baik Pajak Negara (kecuali Bea Materai, Bea Masuk, dan Cukai) ataupun pajak daerah.

2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak

Fiskus berwenang untuk menerbitkan Surat Tagihan pajak, yaitu surat untuk melakukan penagihan pajak atau sanksi administrasi dan atau denda kepada wajib pajak. Surat Tagihan Pajak ini sifatnya memaksa dan wajib pajak tidak dapat mengajukan keberatan.

3. Menerbitkan Keputusan

Keputusan yang diterbitkan oleh Fiskus yang berwenang dapat berupa pengelolaan Pajak Negara atau Pajak Daerah khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4. Melakukan Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dimaksud disini adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dengan tujuan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Melakukan Penyegehan

Penyegehan dilakukan oleh petugas pajak untuk mengamankan atau mencegah hilangnya buku, catatan, dokumen yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan. Penyegehan hanya dilakukan kepada wajib pajak terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Penyegehan biasanya dilakukan karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

6. Mengangkat Pejabat Untuk Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Pengangkatan pejabat ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memantapkan pelaksanaan kegiatan perpajakan. Pejabat yang diangkat adalah petugas pajak dan jurusita pajak. Petugas pajak yang diangkat boleh berasal dari dalam atau luar lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Jurusita Pajak adalah pelaksana penagihan pajak kepada wajib pajak termasuk penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

2.5.2 Hak dan Kewajiban Aparatur Pajak (Fiskus)

Menurut PERATURAN PAJAK MENTERI KEUANGAN NOMOR

1/PM.3 tahun 2007 adapun hak aparatur pajak yaitu :

1. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau melakukan pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan.
2. Menerbitkan surat tagihan pajak.

3. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan.
4. Melakukan penyidikan.
5. Menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan.

Kewajiban aparatur pajak (fiskus) adalah:

a. Kewajiban Umum Fiskus

Fiskus memiliki kewajiban umum untuk memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Kewajiban Khusus Fiskus

1. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sementara dalam waktu tiga hari setelah formulir pendaftaran diterima.
2. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam jangka waktu tiga bulan setelah formulir pendaftaran diterima.
3. Menerbitkan surat keputusan atas pengukuhan pengusaha kena pajak (sebagai wajib pajak pertambahan nilai), dalam jangka waktu tujuh hari sejak formulir pendaftaran diterima.
4. Menerbitkan surat keputusan kelebihan pajak dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal diajukannya surat keputusan kelebihan pajak oleh wajib pajak.
5. Menerbitkan surat perintah untuk membayar kelebihan pajak dalam jangka waktu satu bulan setelah diajukannya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak.

6. Menerbitkan surat keputusan angsuran/penundaan pembayaran pajak dalam jangka waktu tiga bulan untuk angsuran/penundaan surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, serta surat pemberitahuan pajak dan dalam waktu sepuluh hari untuk pengurangan angsuran pajak penghasilan.
7. Memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan.
8. Memberikan keputusan atas pengurangan/penghapusan bunga, denda, serta kenaikan dan pengurangan/pembatalan terkait ketetapan pajak dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan.
9. Merahasikan data/informasi mengenai wajib pajak yang telah disampaikan.

2.6 Tax Avoidance

Menurut Khurana dan Moser, aktivitas Tax Avoidance dilakukan manajemen dengan tujuan semata-mata untuk meminimalkan kewajiban pajak perusahaan (Ayu dan Lulus, 2012). Menurut Nuralifmida dan Lulus (2012) *Tax Avoidance* merupakan strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini menimbulkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik.

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) timbul ketika suatu negara memberlakukan peraturan perpajakan baik pada masyarakat maupun kepada badan usaha yang berada di negara tersebut. Namun, dengan seiring berkembangnya jaman penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) semakin banyak

terjadi ketika suatu negara mulai bersaing dalam pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional. Semakin berkembangnya perekonomian sebuah negara maka akan semakin banyak pula perusahaan atau badan usaha asing yang melakukan investasi pada negara tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan laba maksimal. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh kedua belah pihak adalah, bagi perusahaan asing adalah pajak yang ditetapkan oleh negara tempat dimana perusahaan asing tersebut beroperasi sedangkan bagi negara tersebut adalah kemauan perusahaan asing tersebut untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Permasalahan pajak yang dihadapi oleh perusahaan menyebabkan mereka (perusahaan asing) melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) ditambah dengan peraturan perpajakan menyangkut *Tax Avoidance* yang belum sempurna sehingga masih terdapat celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan praktik tersebut.

2.6.1 Jenis-jenis *Tax Avoidance*

Menurut James Kessler (2010:21) pengertian *tax avoidance* dibagi menjadi 2 jenis, yakni :

1. Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*)
memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Memiliki tujuan usaha yang baik
 - b. Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
 - c. Sesuai dengan *spirit & intention of parliament*
 - d. Tidak melakukan transaksi yang direayasa

2. penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax evasion*) memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
 - b. Semata-mata untuk menghindari pajak
 - c. Tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament*
 - d. Adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian

Kendati demikian, pandangan suatu negara terhadap pengertian penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax evasion*) bisa jadi saling berbeda, sehingga hal ini akan kembali pada bagaimana suatu negara tersebut memahami pengertian dari *tax avoidance* itu sendiri.

2.7 Hasil Penelitian yang Relevan

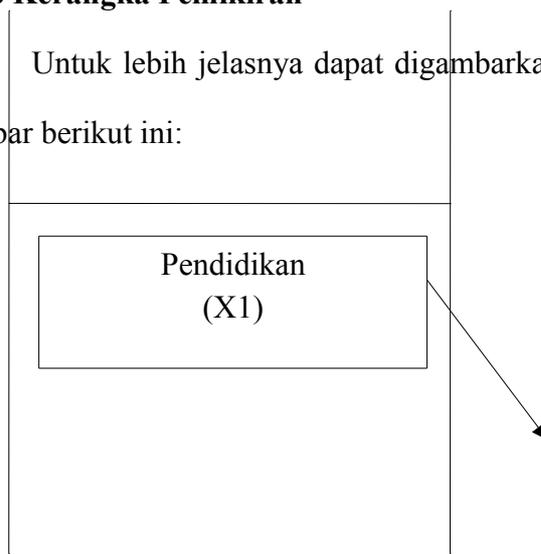
Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

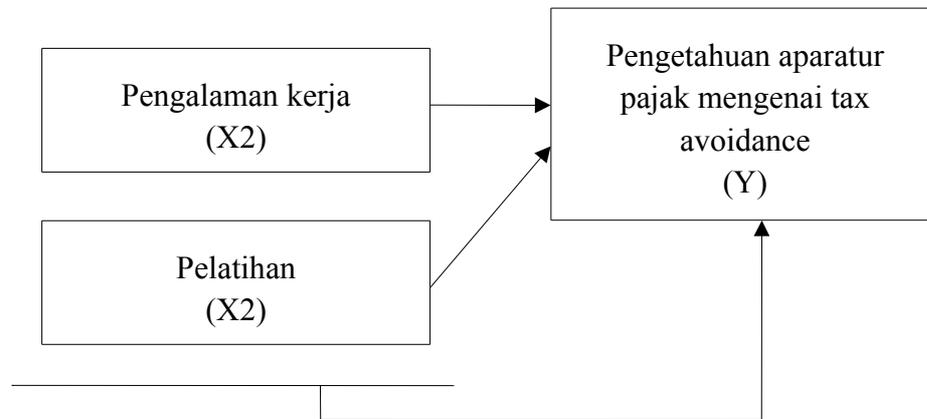
1. Penelitian yang dilakukan oleh Noorina Ayuningtyas (2013), melakukan penelitian dengan judul ” Pengaruh Faktor Pendidikan, Pengalaman Kerja dan pelatihan Terhadap pengetahuan Aparatur Pajak tentang *Tax Avoidance* (Studi Kasus Atas Aparatur Pajak pada KPP Pratama Batu. Hasil menunjukkan secara simultan ketiga variabel menunjukkan signifikan sebesar 0,000. Secara parsial pendidikan menunjukkan signifikan sebesar 0,000; pengalaman kerja sebesar 0,049; dan pelatihan sebesar 0,049. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah faktor pendidikan, pengalaman kerja, dan pelatihan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Permana dan Nofriyanti (2016), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Pendidikan, Pengalaman Kerja dan pelatihan Terhadap pengetahuan Aparatur Pajak tentang *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga)”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel pendidikan dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan aparaturnya pajak tentang *tax avoidance*, sedangkan variabel pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak tentang *tax avoidance*. Secara simultan diperoleh hasil bahwa variabel pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan berpengaruh secara bersama-sama terhadap pengetahuan aparaturnya pajak tentang *tax avoidance*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Miftahuddin (2016), melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengalaman Pemeriksaan Pajak dan Profesionalisme Pemeriksa Pajak terhadap Pemeriksaan Pajak (Survey pada 4 KPP Wilayah Kota Bandung)”. Hasil penelitian menunjukkan dari pengujian baik secara parsial maupun simultan variabel pengalaman pemeriksa pajak dan profesionalisme pemeriksa pajak terbukti berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak.

2.8 Kerangka Pemikiran

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut ini:





Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.9 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik

hipotesa pada penelitian ini sebagai berikut:

- H₁ : Diduga pendidikan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan aparatur pajak mengenai *tax avoidance*
- H₂ : Diduga pengalaman kerja memiliki pengaruh terhadap pengetahuan aparatur pajak mengenai *tax avoidance*
- H₃ : Diduga pelatihan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan aparatur pajak mengenai *tax avoidance*
- H₄ : Diduga pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan memiliki pengaruh terhadap pengetahuan aparatur pajak mengenai *tax avoidance*

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan mengambil objek penelitian KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata (Sugiyono, 2010:23)

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai kantor KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang berjumlah 75 pegawai. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), dimana penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:26). Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 100 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil sehingga dapat ditarik kesimpulan umum.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari data angka dan masih perlu dianalisis kembali.

Sumber data yang digunakan di peroleh dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden yang terpilih melalui pertanyaan yang diajukan berupa kuesioner oleh peneliti kepada pihak terkait.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan berupa kuesioner. Teknik Kuesioner menurut Sugiyono (2010:25) yaitu daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti dimana tiap pertanyaannya berkaitan dengan masalah penelitian.

3.6. Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

1. Pendiikan (X1) adalah usaha sadar dan sistematis yang berlangsung seumur hidup dalam rangka menglihkan pengetahuan oleh seseorang kepada orang lain Anoraga (2009:52-53).
2. Pengalaman kerja (X2) adalah ebagai yang pernah dialami atau dijalani, dirasa, ditanggung, dan sebagainya (KBBI, 2009:26)
3. Pelatihan (X3) adalah proses mengajarkan karyawan baru atau yang ada sekarang, ketrampilan dasar yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka (Dessler, 2009)
4. Pengetahuan aparatur pajak tentang *tax avoidance* (Y) adalah persepsi atau pemahaman yang jelas mengenai tax avoidance yang dimiliki oleh aparatur pajak (Notoatmodjo, 2009:143).

3.7 Teknik Analisis Data

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, maka digunakan angket berskala likert yang diisi oleh responden sesuai dengan indikator variabel. Menurut Sugiyono (2014: 107) bahwa: "Skala likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial”.

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Skala yang digunakan dan skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Skala Likert

No	Jawaban	Bobot Nilai
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju(TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Statiska Untuk Penelitian, Sugiyono (2014:87).

Setelah kuesioner diisi dan dikembalikan oleh responden, data dari hasil kuesioner akan dikumpulkan terlebih dahulu dan dijabarkan dalam bentuk angka-angka sehingga memudahkan dalam proses pengolahan dengan menggunakan spss.

Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahapan sebagai berikut:

- 1. Statistik deskriptif**

Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Sugiyono, 2010:54).

2. Uji Validitas

Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur (dalam hal ini kuisioner) melakukan fungsinya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dari suatu instrument (sugiyono, 2010:55). Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi *Pearson Validity* dengan teknik *Product Moment* yaitu setiap skor tiap item dikorelasikan dengan skor total. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka data dapat dikatakan valid.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Suatu kuisioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang konsisten dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2010:56). Pengujian reliabilitas menggunakan *cronbach alpha*. Suatu alat dikatakan handal jika nilai *cronbach alpha* $> 0,60$.

4. Normalitas data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal (Sugiyono, 2010:110). Untuk mengetahui data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan menggunakan grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal (45°), dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik

histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Sugiyono, 2010:112).

5. Uji Multikolinearitas
 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

6. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

dapat dinyatakan dengan rumus :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

- Y = Pengetahuan aparatur pajak mengenai *tax avoidance*
- a = Nilai Konstanta, yaitu besarnya Y bila X = 0
- b = Koefisien regresi dari variabel bebas
- X₁ = pendidikan
- X₂ = pengalaman kerja
- X₃ = Pelatihan

b. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model (pendidikan, pengalaman kerja dan pelatihan dalam menerangkan variasi variabel dependen atau tidak bebas (pengetahuan aparatur pajak). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1).

c. Uji Hipotesis Uji-t

Dengan menggunakan uji parsial (uji-t), untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis dengan uji-t untuk membandingkan nilai p dengan α pada taraf nyata 95% dan α= 0,05.

H₁ : diterima bila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau nilai sig < Level signifikan (5%)

artinya ada pengaruh pendidikan secara parsial terhadap pengetahuan aparatur pajak mengenai *tax avoidance*